





RENJA DLH
2025



YK
KOTA
YOGYAKARTA

RENCANA KERJA 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

 (0274) 515876
 Jl. Bimasakti No. 1 Yogyakarta
 lingkunganhidup.jogjakota.go.id
 [dlh.kotayk](https://www.instagram.com/dlh.kotayk)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025.

DAFTAR ISI

JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR TABEL	4
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	54
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	54
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta .	56
3.3 Program dan Kegiatan	58
BAB IV.....	65
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	65
BAB V	89
PENUTUP	89

DAFTAR TABEL

Table 1.2 Target, Sasaran, dan Indikator Kinerja DLH Tahun 2024 sesuai Renstra 2023 – 2026.... 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
 13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun ... Nomor ...).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025, diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sejumlah Rp 80.204.439.363,00 (delapan puluh miliar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 85,4 persen dengan realisasi anggaran Rp 68.563.459.452,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 85,4 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebagai berikut:

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dan Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup (PLH). Targekinerja program pada tahun 2023 adalah 25%, dengan realisasi program sebesar 25%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 713.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 689.907.193,00 atau sebesar 96,76%. Faktor pendorong dari

keberhasilan program ini adalah penyusun berusaha tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan penyusunan Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DD-DT LH), sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah minimalnya data yang dimiliki OPD Pemkot (peta dengan skala yang dibutuhkan penyusun).

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan (2) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 360.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.249.193,00 atau terserap 95,90 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 360.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.249.193,00 atau terserap 95,90 persen.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 353.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 344.658.000,00 atau terserap 97,60 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 353.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 344.658.000,00 atau terserap 97,60 persen.

B. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase kebersihan sungai yang terpelihara dan Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang dan 1 (satu) UPT, yaitu Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup (PLH), Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup, dan UPT Laboratorium Lingkungan. Target program pada tahun 2023 untuk indikator Persentase kebersihan sungai yang terpelihara adalah 100%, realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100%. Sementara itu untuk indikator Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP memiliki target sebesar 71,30%, realisasi sebesar 73,74% sehingga capaian kinerja sebesar 103,43%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.771.017.112,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.765.374.967,00 atau sebesar 99,80 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah pembersihan sungai dilakukan secara rutin setiap hari yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan mencakup seluruh penggal sungai oleh petugas sungai (ulu-ulu), Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta rutin setiap 1 tahun sekali mengadakan Gerakan Bersih Sungai (GBS) yang merupakan salah satu Gerakan dengan masyarakat terkait bersih sungai, bekerja sama dengan beberapa Laboratorium dan tenaga ahli dalam analisa hasil pengujian, sehingga meningkatkan validitas hasil pemantauan kualitas

lingkungan, dan memiliki alat AQMS untuk memantau kualitas udara ambien secara real time, sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai dan masih kadang terjadi kendala teknis saat pemantauan di lapangan.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan (3) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 957.089.612,00 dengan realisasi sebesar Rp 953.120.686,00 atau terserap sebesar 99,59 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 198.101.084,00 dengan realisasi sebesar Rp 197,850,656,00 atau terserap 99,87 persen.
 - b. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 758.988.528,00 dengan realisasi sebesar Rp 755.988.528,00 atau terserap 99,51 persen
2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.813.927.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.812.254.281,00 atau terserap 99,91 persen.

C. Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)

Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). Target program pada tahun 2023 adalah 23,340%, realisasi program sebesar 23,344%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100,02%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.877.084.109,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.548.429.289,00 atau sebesar 97,23 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah 1. animo masyarakat terkait keberadaan RTHP masih cukup tinggi dan pemenuhan kebutuhan RTHP sesuai target masih perlu dilakukan, sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pengembangan jalur hijau sudah sulit dilakukan dan kerjasama antara OPD dengan warga atau pengguna RTHP masih kurang.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 11.877.084.109,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.548.429.289,00 atau terserap sebesar 97,23%, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.982.831.686,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.746.495.720,00 atau terserap 95,26 persen.
- b. Sub kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp6.894.252.423,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.801.933.569,00 atau terserap 98,66 persen.

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup, Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan, dan Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup (PLH) beserta Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup. Indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup memiliki target pada tahun 2023 untuk adalah 8%, realisasi program sebesar 29,94%, sehingga capaian kinerja program sebesar 372,93%. Indikator Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dengan target 80,77%, realisasi sebesar 76,84%, sehingga capaiannya sebesar 95,13%. Untuk indikator Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan target 15,58%, realisasi sebesar 15,54%, sehingga capaiannya sebesar 99,74%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 614.243.278,00 dengan realisasi sebesar Rp 571.973.560,00 atau sebesar 93,12 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah terdapat aplikasi SILALING yang mempermudah pemantauan secara tidak langsung / swapantau dan kesadaran dari perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam izin lingkungan, perizinan penyelenggaraan kegiatan menara telekomunikasi dan reklame yang membutuhkan dokumen lingkungan, dan sebagai syarat persetujuan lingkungan dan perubahan persetujuan lingkungan. Sementara itu faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah belum semua usaha/kegiatan melaksanakan pelaporan swapantau, dalam satu tahun kegiatan pembinaan dilakukan kepada 20 pelaku usaha sementara sosialisasi terkait pengelolaan Limbah B3 juga dilakukan kepada 160 pelaku usaha, pelaku usaha yang sudah dibina dan diundang dalam sosialisasi tidak semua melakukan tindak lanjut sehingga dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 belum dapat memenuhi capaian target, serta terdapat dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang masih dalam proses revisi dan berkas yang terhenti pada pelaku usaha berjumlah 23 dokumen, proses dokumen lingkungan hanya mengacu ke permohonan dokumen yang diajukan oleh pemohon ke sistem perizinan online

Kota Yogyakarta, dan permohonan dokumen lingkungan yang masih perlu perbaikan dan revisi, tidak kembali ke DLH dan posisi masih di pemohon.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran pada kegiatan ini sama seperti pada anggaran program. Kegiatan ini yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 355.042.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 344.348.000,00 atau terserap 96,99 persen.
 - b. Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 38.125.778,00 dengan realisasi sebesar Rp 37.964.185,00 atau terserap 99,58 persen
 - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 180.162.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 221.075.000,00 atau terserap 85,79 persen.

E. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase Kampung ProKlim, Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan, dan Persentase Bank sampah yang aktif. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup. Target program pada tahun 2023 untuk indicator Persentase Kampung ProKlim adalah 59,17%, realisasi sebesar 62,13%, sehingga capaian kinerja sebesar 105%. Untuk indicator Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dengan target 37,42%, realisasi sebesar 35,48% sehingga capaian sebesar 94,83%. Sementara itu untuk indicator Persentase Bank sampah yang aktif sebesar 56,92%, realisasi sebesar 72,67% sehingga capaian sebesar 127,68%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.073.558.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.672.624.450,00 atau sebesar 90,16 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah kepedulian masyarakat untuk mengelola lingkungan terkait program pemerintah tentang program zero sampah anorganik semakin meningkat, kepedulian sekolah untuk mengelola lingkungan dan merubah perilaku peduli lingkungan di sekolah melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya LH di Sekolah semakin meningkat, dan program pemerintah mengenai gerakan zero sampah anorganik mendorong masyarakat

untuk mengaktifkan kegiatan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Sementara itu faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah untuk mengubah perilaku perilaku warga masyarakat terhadap peduli lingkungan memerlukan waktu dan keterpaduan dari program kegiatan lain, bila proses GPBLHS berbarengan dengan kegiatan sekolah lainnya, dan juga untuk mengubah perilaku warga sekolah terhadap perilaku peduli lingkungan memerlukan waktu, dan terjadi penurunan semangat atau malas untuk meningkatkan keaktifan masyarakat mengelola sampah melalui bank sampah.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
- Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 4.073.558.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.672.624.450,00 atau sebesar 90,16 persen.

F. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase sampah yang berkurang dan Persentase sampah yang tertangani. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Persampahan. Target program pada tahun 2023 untuk indikator Persentase sampah yang berkurang adalah 15%, realisasi sebesar 19,29%, sehingga capaian kinerja sebesar 128,61%. Untuk indikator Persentase sampah yang tertangani dengan target 84,60%, realisasi sebesar 80,54% sehingga capaian sebesar 95,20%.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Tenaga Ahli terkait Penyusunan laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, adanya dukungan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah, sudah diadakan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan metode penerimaan retribusi khususnya secara non tunai untuk mendukung ETPD Pemkot Yogyakarta, sudah diadakan koordinasi dengan kemantren dan penunjukan personil pemungut retribusi PKL dari kemantren, dan sudah diupayakan penagihan kepada Wajib Retribusi yang menunggak tagihan retribusi, adanya dukungan dari pemangku kebijakan terkait anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana utamanya untuk jasa tenaga kebersihan dan sopir. Sementara itu faktor penghambat sub kegiatan ini adalah kurangnya survey data di lapangan, diberlakukannya pembatasan kuota pengangkutan sampah ke TPA Piyungan sehingga terjadi penumpukan, SIM Retribusi masih perlu pengembangan dan perbaikan karena ada beberapa menu yang kurang, belum maksimalnya pembayaran secara non tunai, dan belum optimalnya pendataan Wajib Retribusi sehingga masih banyak potensi retribusi yang belum tertagih, proses administrasi dan revisi hasil review pengadaan barang jasa, khususnya jasa tenaga penanganan sampah memakan waktu yang cukup lama, pengadaan mesin Incinerator di

tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan penyedia barang menyampaikan bahwa waktu pelaksanaan pengadaan hingga Mesin Incinerator siap dioperasikan membutuhkan waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

- a. Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 79.340.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 74.335.000,00 atau sebesar 93,69 persen.

- b. Sub kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 323.594.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 307.809.750,00 atau sebesar 95,12 persen.

- c. Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 5.277.579.082,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.152.819.515,00 atau sebesar 78,69 persen.

- d. Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 1.245.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.183.414.800,00 atau sebesar 95,00 persen.

- e. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 13.859.535.136,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.475.084.136,00 atau sebesar 97,23 persen.

- f. Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 12.651.885.411,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.424.274.703,00 atau sebesar 42,87 persen.

G. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang dan 1 UPT, yaitu Sekretariat dan UPT Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perbengkelan. Target program pada tahun 2023 adalah A, realisasi yaitu A dengan poin 80,7 sehingga capaian kinerja sebesar 115,29%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi antar Subbag dan Kelompok Substansi, sedangkan faktor penghambatnya

adalah kurangnya pencermatan terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 3.701.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.860.000,00 atau sebesar 77,28 persen.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2.571.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.404.500,00 atau sebesar 93,51 persen.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 38.529.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 35.827.350,00 atau sebesar 92,99 persen.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 20.444.006.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.977.756.823,00 atau sebesar 92,83 persen.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 630.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 553.000,00 atau sebesar 87,78 persen.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 520.000,00 atau sebesar 100 persen.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 230.000,00 atau sebesar 44,23 persen.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2.610.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.533.000,00 atau sebesar 97,05 persen.
 - f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 391.000,00 atau sebesar 97,75 persen.
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

- Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 470.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 470.000,00 atau sebesar 100 persen.
- h. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 438.000,00 atau sebesar 95,22 persen.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 12.258.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.258.000,00 atau sebesar 100 persen.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 744.718.658,00 dengan realisasi sebesar Rp 731.883.923,00 atau sebesar 98,28 persen.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Bengkel)
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 137.947.750,00 dengan realisasi sebesar Rp 137.164.375,00 atau sebesar 99,43 persen.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 8.940.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.918.500,00 atau sebesar 99,76 persen.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 1.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.080.000,00 atau sebesar 100 persen.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 185.925.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 182.017.526,00 atau sebesar 97,90 persen.
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Bengkel)
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2.178.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.936.000,00 atau sebesar 88,89 persen.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.500.000,00 atau sebesar 100 persen.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 122.952.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 109.863.711,00 atau sebesar 89,35 persen.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 1.147.226.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.147.136.469,00 atau sebesar 99,99 persen.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Bengkel)

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 237.744.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 237.744.000,00 atau sebesar 100 persen.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT Bengkel)
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2.849.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.334.635.910,00 atau sebesar 81,94 persen.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 162.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 160.733.200,00 atau sebesar 98,97 persen.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 458.404.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 455.602.802,00 atau sebesar 99,93 persen.

H. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Program ini menggunakan sumber dana Dana Keistimewaan DIY sehingga dalam pencapaian indikator program ini didukung oleh beberapa OPD. Kegiatan program ini yang dilaksanakan oleh DLH adalah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede. Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 149.654.000, atau sebesar 99,77%.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023				
		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Keuangan
3	4		Rp		Rp	%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	25.00%	713,000,000		689,907,193	96.76%
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100.00%				
1 Subkeg Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	3 dokumen	360,000,000	3 dokumen	345,249,193	95.90%
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen				
2 Subkeg Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	353,000,000	2 dokumen	344,658,000	97.64%
Rata-rata capaian kinerja						96.77%
Predikat kinerja						Sangat Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kebersihan Sungai yang terpelihara	100.00%	2,771,017,112		2,765,374,967	99.80%
	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SO	71.30%				

	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen				
		Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	5 dokumen				
1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen	198,101,084	3 dokumen	197,850,656	99.87%
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	5 dokumen	758,988,528	5 dokumen	755,270,030	99.51%
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4 dokumen				
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4 dokumen	1,813,927,500	4 dokumen	1,812,254,281	99.91%
Rata-rata capaian kinerja							99.76%
Predikat kinerja							Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							
		Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola	2.76 Ha				
		Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola	76.7 Ha				
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	99.99%	4,982,831,686	99.99%	4,746,495,720	95.26%

		Kabupaten/Kota					
			0.00%		99.99%		
	2.88 Ha	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00%		99.99%		
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		99.99%	6,894,252,423	99.99%	6,801,933,569	98.66%
		Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00%		99.99%		
	76.7 Ha	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00%		99.99%		
Rata-rata capaian kinerja							96.96%
Predikat kinerja							Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup	8.00%	614,243,278		571,973,560	93.12%
		Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	80.77%				
		Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	15.58%				
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	215 dokumen				
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	56 dokumen	355,042,500	56 dokumen	344,348,000	96.99%
2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin	Jumlah Laporan Dari Usaha	30 laporan	38,125,778	24 laporan	37,964,185	99.58%

	Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	215 dokumen	221,075,000	215 dokumen	189,661,375	85.79%
			100.00%		98.75%		
Rata-rata capaian kinerja							94.12%
Predikat kinerja							Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim	37.42%	4,073,558,000	35.48%	3,672,624,450	90.16%
		Persentase Bank Sampah yang aktif	56.92%				
		Persentase Kampung ProKlim	59.17%				
		Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	37.42%				
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	43 lembaga				

1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	43 lembaga	4,073,558,000	43 lembaga	3,672,624,450	90.16%
Rata-rata capaian kinerja							90.16%
Predikat kinerja							Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
		Persentase sampah yang berkurang	15.00%	33,437,624,129		24,617,737,904	73.62%
		Persentase sampah yang tertangani	84.60%				
Kegiatan Pengelolaan Sampah		Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaaur ulang dan pemanfaatan kembali	8 laporan				
		Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta	284.35 ton/hari				
1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		100.00%	79,340,000	93.69%	74,335,000	93.69%
		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen		93.69%		
2	Pengurangan Sampah dengan melakukan PembatasanPendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		100.00%	323,594,500	99.15%	307,809,750	95.12%
		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	100.00%		99.15%		

	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	100.00%		99.15%		
3	Penanganan Sampah dengan melakukan PemilahanPengumpulanPengangkutanPengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		100.00%	5,277,579,082	78.70%	4,152,819,515	78.69%
		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0.00%		78.70%		
	284.35 ton/hari	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0.00%		78.70%		
4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		100.00%	1,245,690,000	99.15%	1,183,414,800	95.00%
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100.00%		99.15%		
	27 kelompok	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100.00%		99.15%		
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	100.01%	13,859,535,136	100.01%	13,475,084,136	97.23%

			0.00%		99.99%		
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	99.98%	12,651,885,411	45.32%	5,424,274,703	42.87%
	63 unit (57)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0.00%		45.32%		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0.00%		45.32%		
Rata-rata capaian kinerja							83.77%
Predikat kinerja							Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26,567,912,735		24,547,458,089	92.40%
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	28 dokumen	44.802.000			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	3,701,000	4 dokumen	2,860,000	77.28%
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	2,571,500	4 dokumen	2,404,500	93.51%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	21 laporan	38,529,500	21 laporan	35,827,350	92.99%

		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	1255 dokumen				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 orang/bulan	20,444,006,800	222 orang/bulan	18,977,756,823	92.83%
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	630,000	12 dokumen	553,000	87.78%
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 dokumen	520,000	1200 dokumen	520,000	100.00%
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	520,000	12 dokumen	230,000	44.23%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	2,610,000	12 laporan	2,533,000	97.05%
9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 dokumen	400,000	6 dokumen	391,000	97.75%
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	460,000	1 dokumen	438,000	95.22%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	5 laporan				
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	12,258,000	1 paket	12,258,000	100.00%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	744,718,685	7 paket	731,883,923	98.28%
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	100.00%	137,947,750	99.43%	137,164,375	99.43%

	5 laporan (1 paket)	Disediakan					
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	8,940,000	2 paket	8,918,500	99.76%
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1,080,000	1 dokumen	1,080,000	100.00%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	185,925,000	2 laporan	182,017,526	97.90%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	2,178,000	12 laporan	1,936,000	88.89%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan				
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2,500,000	1 laporan	2,500,000	100.00%
20	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	122,952,500	4 laporan	109,863,711	89.35%
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	1,147,226,000	4 laporan	1,147,136,469	99.99%
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	237,744,000	12 laporan	237,744,000	100.00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai	150 unit				
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	141 unit	2,849,220,000	92.00%	2,334,635,910	81.94%

			100.00%		92.00%		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.00%		92.00%		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai	150 unit				
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	162,400,000	2 unit	160,733,200	98.97%
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00%	458,404,000	100.00%	455,602,802	99.39%
	3 unit (1 unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00%		100.00%		
Rata-rata capaian kinerja							93.30%
Predikat kinerja							Sangat Tinggi

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2023 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54.66 %
2	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99.60 %
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	B Huruf

NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang telah dicapai / Jumlah seluruh Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota x 100%	100,00 %	0	0	0	25,00 %	713,000,000	25,00%	713,000,000	25,00%	689,907,193	100%	96.76%						
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota																						
		1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				0,00	0,00		360,000,000	100,00%	360,000,000	100,00%	345,249,193	100,00%	95,90%							
			Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota																						
		2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD							353,000,000	100,00%	353,000,000	100,00%	344,658,000	100,00%	97,64%							
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	96,77%						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sungai yang terpelihara	(Panjang sungai yang dipelihara / panjang sungai di Kota Yogyakarta) x 100%	100%	0	100%	0	100%	2,771,017,112	100,00%	2,771,017,112	74,46%	2,765,374,967	74,46%	99,80%						
			Persentase sungai yang terpelihara	(20% Hasil pemantauan kualitas air ditambah 80% Hasil pemantauan kualitas udara) dikali 100%	73,10%	0		0	71,30%	0,00	71,30%	0,00	73,74	0,00	103,42%	0,00%						
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																						

	1	Koordinasi/Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah/Air/Udaradan Laut							198,101,084	100.00%	198,101,084	100.00%	197,850,656	100.00%	99.87%								
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%									
	2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan							758,988,528	100.00%	758,988,528	100.00%	755,270,030	100.00%	99.51%								
		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%									
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																							
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar							1,813,927,500	100.00%	1,813,927,500	100.00%	1,812,254,281	100.00%	99.91%								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		0.00%		100.00%		0.00%									
Rata-rata capaian kinerja														100.00%	99.76%								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								

		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	(Luas Ruang Terbuka Hijau / Luas Kota Yogyakarta) x 100%	23,56 %	0	0		11,877,084,109	23,340%	11,877,084,109	23,341%	11,548,429,289	100,01%	97,23%								
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																							
	1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							4,982,831,686	99,99%	4,982,831,686	99,99%	4,746,495,720	100,00%	95,26%								
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Ha		0 Ha		3 Ha		0.00%		99.99%		0.00%									
	2	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya							6,894,252,423	99,99%	6,894,252,423	99,99%	6,801,933,569	100,00%	98,66%								
		Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Ha		0 Ha		77 Ha		0.00%		99.99%		0.00%									
Rata-rata capaian kinerja														100.00%	96.96%								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								

	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup	(Jumlah pelaporan swapantau dan pengawasan usaha) / (Jumlah usaha yang memiliki izin lingkungan) x 100%	8,00%	0	122,05%	0	8%	614,243,278	8%	614,243,278	29,94%	571,973,560	374,25%	93,12%					Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M
		Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	(Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dibagi Jumlah Total usaha) x 100%	82,03%	0	94,50%	0	80,77%	0	80,77%	0	76,84%	0	0,95%	0,00%					Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M	

persampahan				dikali 100%																			
			Persentase sampah yang tertangani	(Jumlah sampah yang tertangani dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%	80.50%	0	0	84.60%	0	84.60%	0	80.54%		95.20%	0								
Pengelolaan Sampah																							
1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	79,340,000	100.00%	79,340,000	93.69%	74,335,000	93.69%	93.69%							
			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		93.69%		93.69%								
2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan/Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				0 laporan		0 laporan		4 laporan	323,594,500	100.00%	323,594,500	99.15%	307,809,750	99.15%	95.12%							
			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100.00%		99.15%		99.15%								
3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan/Pengumpulan/Pengangkutan/Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				0 ton per hari		0 ton per hari		284 ton per hari	5,277,579,082	100.00%	5,277,579,082	78.70%	4,152,819,515	78.70%	78.69%							
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		0 ton per hari		0 ton per hari		284 ton per hari		0.00%		78.70%		0.00%								
4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				0 kelompok		0 kelompok		27 kelompok	1,245,690,000	100.00%	1,245,690,000	99.15%	1,183,414,800	99.15%	95.00%							
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		27 kelompok		100.00%		99.15%		99.15%								
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	13,859,535,136	100.01%	13,859,535,136	100.01%	13,475,084,136	100.00%	97.23%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0.00%		99.99%		0.00%								
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				0 unit		0 unit		57 unit	12,651,885,411	99.98%	12,651,885,411	45.32%	5,424,274,703	45.33%	42.87%							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		0 unit		0 unit		57 unit		0.00%		45.32%		0.00%								
Rata-rata capaian kinerja														86.00%	83.77%								
Predikat kinerja														Tinggi	Tinggi								

Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	A Nilai	0	0	A huruf	26,567,912,735	A huruf	26,567,912,735	A huruf	24,547,458,089	100%	92.40%						
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	3,701,000	100.00%	3,701,000	100.00%	2,860,000	100.00%	77.28%						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	2,571,500	100.00%	2,571,500	100.00%	2,404,500	100.00%	93.51%						
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 laporan	0 laporan	21 laporan	38,529,500	100.00%	38,529,500	100.00%	35,827,350	100.00%	92.99%						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 laporan	0 laporan	21 laporan		100.00%		100.00%		100.00%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	20,444,006,800	100.00%	20,444,006,800	100.00%	18,977,756,823	100.00%	92.83%						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan		100.00%		100.00%		100.00%							
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	630,000	100.00%	630,000	100.00%	553,000	100.00%	87.78%						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	520,000	100.00%	520,000	100.00%	520,000	100.00%	100.00%						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	520,000	100.00%	520,000	100.00%	230,000	100.00%	44.23%						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 laporan	0 laporan	12 laporan	2,610,000	100.00%	2,610,000	100.00%	2,533,000	100.00%	97.05%						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0 laporan	0 laporan	12 laporan		100.00%		100.00%		100.00%							
9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	400,000	100.00%	400,000	100.00%	391,000	100.00%	97.75%						
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							470,000	100.00%	470,000	100.00%	470,000	100.00%	100.00%						

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: pada tahun berikutnya agar dapat melakukan reuiu target renstra pada indikator program

Yogyakarta,
,

2024

Yogyakarta,

2024

Disusun oleh
Kepala DLH

Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Drs. Sugeng Darmanto
NIP. 196501221992031005

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 7 (tujuh) program dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja program dan 19 (sembilan belas) kegiatan, 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan 43 (empat puluh tiga) indikator kinerja sub kegiatan;
 - b. Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 9 (sembilan) indikator yang melampaui target, dan 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
 - c. Dari 43 (empat puluh tiga) indikator kinerja sub kegiatan, 35 (tiga puluh lima) indikator telah memenuhi target.

2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 7 (tujuh) program dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan, 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan 43 (empat puluh tiga) indikator kinerja sub kegiatan;
 - b. Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan semua indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
 - c. Dari 43 (empat puluh tiga) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan semua memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah pelayanan urusan lingkungan hidup, yang meliputi:

1. permohonan arahan dokumen lingkungan (penapisan)
2. SPPL
3. rincian teknis penyimpanan Limbah B3
4. persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah
5. persetujuan teknis pembuangan emisi;
6. persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3
7. surat kelayakan operasional sistem pengolahan air limbah atau fasilitasi injeksi

8. surat kelayakan operasional alat pengendali emisi
9. surat kelayakan operasional pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3
10. rekomendasi persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup
11. rekomendasi keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib amdal
12. rekomendasi persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup
13. Rekomendasi persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup
14. rekomendasi teknis izin penebangan pohon dan pemindahan taman
15. rekomendasi teknis armada angkutan sampah
16. rekomendasi teknis usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga/sampah domestik
17. retribusi kebersihan masyarakat

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercantum dalam Kepwal Yogyakarta No. 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan yang tercantum dalam Kepwal Yogyakarta No. 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang tercantum dalam Kepwal Yogyakarta No. 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54.66 %	55.19%	55.47%	55.87%		52.06		

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99.60%	99.60%	99.70%	99.70%		99.84%		
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai		A Nilai		

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 54,66% dengan realisasi sebesar 52,06. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Capaian Pengelolaan Persampahan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 99,84% dari target sebesar 99,60% dengan capaian kinerja sebesar 100,24% persen; dan tujuan Meningkatkan reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat telah dapat melampaui target dimana realisasinya A dari target B, dengan capaian kinerja sebesar 115,29%.
2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 54,66% dengan realisasi sebesar 52,06. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Capaian Pengelolaan Persampahan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 99,84% dari target sebesar 99,60% dengan capaian kinerja sebesar 100,24% persen; dan sasaran Meningkatkan reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat telah dapat melampaui target dimana realisasinya A dari target B, dengan capaian kinerja sebesar 115,29%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup

mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Sebagian besar masyarakat yang berada di pinggiran sungai masih memiliki kebiasaan membuang limbah domestiknya ke dalam sungai sehingga mengakibatkan kadar *fecal coli*, total coliform, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu dan menurunkan nilai Indeks Kualitas Air.
2. Penutupan TPA sebagai tindak lanjut Pemerintah Propinsi dalam melaksanakan desentralisasi pengelolaan persampahan kepada Kabupaten/Kota juga berdampak pada beberapa hal. Seperti misalnya kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai meningkat sehingga juga bisa berdampak pada menurunnya kualitas sungai. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan dari penutupan TPA adalah tertahannya sampah rumah tangga di rumah penduduk, depo, atau TPS, sehingga tidak sedikit masyarakat yang kerap membakar sampah, hal ini dapat menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas udara.
3. Wilayah Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan, selain itu juga mengurangi polusi udara dan air perkotaan. Di sisi lain, keterbatasan lahan di wilayah Kota Yogyakarta yang hanya 32,8 km² menjadi sangat sulit untuk prosentase RTHP sebagaimana yang ditargetkan secara nasional yakni 20% luas wilayah atau seluas 6,56 km². Selain itu juga benturan kepentingan antara masyarakat dengan DLH atau dengan antar Perangkat Daerah juga dapat mengakibatkan menurunkan tutupan lahan dengan adanya penebangan pohon, seperti penebangan pohon in gang karena kepentingan masyarakat atau penebangan pohon di jalur divider untuk pelebaran jalan.
4. Dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, masyarakat masih belum berperilaku 3R (*reduce, reuse, recycle*). Masyarakat masih kurang tertib dalam hal waktu dan tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya terutama pengunjung dari luar kota. Hal tersebut menyebabkan pengurangan sampah belum berjalan maksimal.
5. Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum mampu menurunkan persentase sampah yang terkurangi dan tertangani, selain itu juga adanya penolakan warga atas keberadaan TPS3R Nitikan maupun RDF di Piyungan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal warga.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Luas wilayah Kota Yogyakarta sempit dengan kepadatan penduduk tinggi.
2. Masyarakat Kota Yogyakarta heterogen dengan mobilitas tinggi.
3. Sumber Daya Alam terbatas.
4. Partisipasi dan peran aktif masyarakat rendah.
5. Pertumbuhan ekonomi dengan investasi tinggi.

Sedangkan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasannya adalah dengan:

- Adanya undang-undang Keistimewaan.
- Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Kesempatan SDM aparatur meningkatkan kompetensi dan kapasitas.
- Pendanaan dari CSR dan sumber lain.
- Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, tujuan wisata, kota pendidikan dan budaya.
- Kemajuan teknologi.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah dalam rumah tangga, masyarakat masih belum berperilaku 3R, masyarakat masih kurang tertib dalam hal waktu dan tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya terutama pengunjung dari luar kota dapat dilakukan upaya sebagai berikut dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan termasuk di dalamnya sosialisasi Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) dan melakukan pendampingan terhadap 666 kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R). Selain itu, melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap Bank Sampah, dan melakukan optimalisasi fungsi rumah kompos di TPST Nitikan dengan adanya inovasi LARON SARUNGAN (Laboratorium Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan) sebagai pusat pemilahan dan pengurangan sampah.

Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum cukup signifikan menurunkan permasalahan sampah dan adanya penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya dapat dilakukan upaya yaitu dengan melaksanakan pemeliharaan kebersihan meliputi penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada penggal jalan di wilayah Kota Yogyakarta serta pemeliharaan TPS/depo/landasan container.

2. Kebiasaan masyarakat membuang limbah domestiknya ke dalam sungai dan memelihara ternak di sepanjang pinggiran sungai yang dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta dapat dilakukan upaya seperti melaksanakan pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kebersihan dan kualitas air sungai yang dapat dilakukan dengan Kerja Bakti rutin untuk membersihkan sungai. Selain itu, menerapkan sanksi sesuai perundangan yang berlaku terhadap pelanggar pengelolaan lingkungan dan dilaksanakan dengan adanya koordinasi bersama

instansi terkait seperti Satpol PP. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Bappeda, Dinas PUPKP, Dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Kewilayahan, dll mengenai pembangunan perkotaan yang berdampak terhadap lingkungan.

3. Keterbatasan lahan Wilayah Kota Yogyakarta untuk penghijauan dapat dilakukan upaya seperti memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat digunakan untuk menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota yang berada di wilayah permukiman serta meningkatkan jumlah penanaman pohon di sepanjang jalur hijau dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menindaklanjuti pembangunan fisik RTHP untuk tanah-tanah yang dapat distatusfungsikan dan dimanfaatkan sebagai RTHP berdasarkan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah ***“Pemantapan Pembangunan Manusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat”*** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan menyempang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 6 dan 10, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.5 berikut

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Yogyakarta

Nama SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						RENJA 2025				
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	3	4	8	9	10	3	4	8	9	10
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			82,156,126,279.00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			79,776,605,319.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			82,156,126,279.00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			79,776,605,319.00	
	-			82,156,126,279.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			79,776,605,319.00	
1.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i>	75 % 100 %	281,100,000.00		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	100 % 75 %	241,100,000.00	

	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	193,140,000.00		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	153,140,000.00	
	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota					Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				
		Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	193,140,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	153,140,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3 dokumen	87,960,000.00		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3 dokumen	87,960,000.00	
	Pemantauan dan Evaluasi KLHS					Pemantauan dan Evaluasi KLHS				
		Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3 Dokumen	87,960,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3 Dokumen	87,960,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebersihan sungai yg terpelihara Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	100 % 72.60 %	2,385,519,700.00		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	60.53 % 76.67 %	2,482,119,700.00	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen	241,073,800.00		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen	237,673,800.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				

		<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	3 Dokumen	241,073,800.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	3 Dokumen	237,673,800.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</i>	4 dokumen	2,144,445,900.00		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</i>	4 dokumen	2,244,445,900.00	
Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				
		<i>luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>	320400 M2	1,917,562,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>	320400 M2	1,917,596,500.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota				
		<i>jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota</i>	5 Kegiatan	226,883,900.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota</i>	5 Kegiatan	326,849,400.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Persentase Ruang Terbuka Hijau</i>	23,346 %	12,707,402,459.00		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Capaian Pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan</i>	61.6661%	19,098,895,889.00	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola</i>	2.96 Ha 76.7 Ha	12,707,402,459.00		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola</i>	76.7 Ha 2.96 Ha	19,098,895,889.00	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				

		<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2.86 Ha	4,656,857,775.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2.96 Ha	8,069,260,955.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya					Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya					
		<i>Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Unit	8,050,544,684.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Unit	11,029,634,934.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	15.00 % 19,27 %	641,669,300.00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase kepatuhan pelaku usaha Melakukan pengelolaan lingkungan hidup Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan</i>	33.30 % 78.66 %	636,829,300.00	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	26 laporan	641,669,300.00		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	26 laporan	636,829,300.00	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					
		<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>	156 Dokumen	582,810,300.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>	156 Dokumen	582,810,300.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>	34 Badan Usaha	58,859,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>	34 Badan Usaha	54,019,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Kampung ProKlim Persentase Bank sampah yang aktif Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan</i>	65.09 % 62.98 % 43.87 %	2,364,859,900.00		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Kampung ProKlim Persentase Bank sampah yang aktif Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata</i>	65.09 % 62.98 % 76.45 %	2,364,859,900.00	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH</i>	43 lembaga	2,364,859,900.00		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH</i>	43 lembaga	2,364,859,900.00	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				
		<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>	15 Lembaga	2,364,859,900.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>	15 Lembaga	2,364,859,900.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Persentase sampah yang berkurang Persentase sampah yang tertangani</i>	17.60 % 82.10 %	40,576,064,935.00		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Persentase sampah yang tertangani Persentase sampah yang berkurang</i>	82.10 % 17.60 %	36,519,597,045.00	

	Pengelolaan Sampah	<i>Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta</i>	8 laporan 278.90 ton/hari	40,576,064,935.00		Pengelolaan Sampah	<i>Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta</i>	8 laporan 278.90 ton/hari	36,519,597,045.00		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					
		<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>	27 Kelompok	1,071,859,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>	27 Kelompok	1,071,859,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada</i>	12 Dokumen	19,347,405,100.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada</i>	12 Dokumen	18,654,827,220.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota					

		<i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan</i>	1 Dokumen	21,780,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan</i>	1 Dokumen	21,780,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota						Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota					
		<i>Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota</i>	1 Dokumen	79,451,500.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota</i>	1 Dokumen	79,451,500.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah						Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah					
		<i>Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik</i>	94 Unit	3,059,004,025.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik</i>	94 Unit	2,988,714,925.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					
		<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>	34430 Ton	4,928,887,360.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>	34430 Ton	1,638,476,450.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah					Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				
		<i>Jumlah sampah yang terdaur ulang</i>	15000 Ton	22,070,750.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah sampah yang terdaur ulang</i>	15000 Ton	18,880,750.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				
		<i>jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional</i>	21900 Ton	12,045,607,200.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional</i>	21900 Ton	12,045,607,200.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup</i>	A Nilai	23,199,509,985.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup</i>	A Nilai	23,157,998,485.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	28 dokumen	47,095,800.00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	28 dokumen	57,295,800.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	7,335,300.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	17,535,300.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	4 Dokumen	2,819,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	4 Dokumen	2,819,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	36,941,500.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	36,941,500.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		1255 dokumen	20,748,801,150.00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1255 dokumen	20,748,801,150.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	174 Orang/bulan	20,742,411,150.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	174 Orang/bulan	20,742,411,150.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	395,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	395,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1800 Dokumen	990,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1800 Dokumen	990,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					

		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	12 Dokumen	960,000.00	-		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	12 Dokumen	960,000.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	12 Laporan	1,680,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	12 Laporan	1,680,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	5 Dokumen	1,300,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	5 Dokumen	1,300,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	12 Laporan	670,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	12 Laporan	670,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
		<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen	395,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen	395,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</i>	5 laporan	527,137,895.00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</i>	5 laporan	534,410,395.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	20,335,200.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	20,332,200.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket	340,357,195.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket	346,102,695.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	16,295,500.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	17,825,500.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1,800,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1,800,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan	148,350,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan	148,350,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</i>	3 laporan	1,561,423,140.00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</i>	3 laporan	1,502,067,140.00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	3,000,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	3,000,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	189,000,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	189,000,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	1,369,423,140.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	1,310,067,140.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	150 Unit	315,052,000.00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	150 Unit	315,424,000.00		

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	99 Unit	115,052,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	99 Unit	115,424,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	200,000,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	200,000,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN			567,002,540.00		UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN			992,804,540.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			567,002,540.00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			992,804,540.00	
	-			567,002,540.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			992,804,540.00	
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP</i>	72.60 %	567,002,540.00		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP</i>	72.60 %	992,804,540.00	

	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan</i>	5 dokumen	567,002,540.00		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan</i>	5 dokumen	992,804,540.00	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				
		<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	2 Dokumen	567,002,540.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	2 Dokumen	992,804,540.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN			4,178,438,150.00		UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN			3,602,606,350.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4,178,438,150.00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3,602,606,350.00	
	-			4,178,438,150.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			3,602,606,350.00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup</i>	A Nilai	4,178,438,150.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup</i>	A Nilai	3,602,606,350.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</i>	3 laporan	237,744,000.00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</i>	3 laporan	237,744,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	237,744,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	237,744,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan Selesai</i>	150 Unit	3,862,053,900.00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan Selesai</i>	150 Unit	3,294,119,100.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	182 Unit	3,862,053,900.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	182 Unit	3,294,119,100.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</i>	5 laporan	78,640,250.00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</i>	5 laporan	70,743,250.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	16 Laporan	1,936,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	16 Laporan	1,936,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material						Penyediaan Bahan/Material				
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1 Paket	76,704,250.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1 Paket	68,807,250.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua

					Kel/Desa					Kel/Desa
				86,901,566,969.00					89,096,811,209.00	

2.5. Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun DLH juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Hasil pencermatan usulan musrenbang kecamatan yang dapat diakomodir dalam perencanaan dan penganggaran di DLH disajikan dalam tabel Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No.	Kelurahan	Usulan Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	Wirobrajan	Pembangunan fisik	Penataan RTHP dan balai RW 06 yang berlokasi di bekas makam Jopraban dengan luas 1099 m ² . Kegiatan ini bekerjasama dengan PUPKP Kota
		Pembangunan fisik	Penataan RTHP bagi warga yang berlokasi di RW 12 dengan volume 1 unit. Kegiatan ini bekerjasama dengan PUPKP Kota
		Pembangunan fisik (Sheet OPD)	RTHP di RW 12 agar lingkungan lebih sehat dengan volume 15 unit. Kegiatan ini bekerjasama dengan PUPKP
2	Pringgokusuman	Pengadaan/penyempurnaan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTHP)	Pemeliharaan perbaikan RTHP di RW 25 kampung Notoyudan karena sudah banyak fasilitas yang rusak dengan volume 1 unit dengan pembiayaan 30.000.000
		Pembentukan bank sampah baru	Pengadaan Bank Sampah Unit (BSU) dengan harapan warga bias memilah dan mengolah sampah dirumah dengan volume 1 paket dan pembiayaan 1.500.000
3	Brontokusuman	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pemanfaatan tanah Negara yang belum tergarap mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi kumuh dan akan dibangun menjadi taman bermain anak untuk semua warga yang berlokasi di RT 64 Karanganyar dengan luas 443m ² serta pembiayaan sebesar 332.250.000
4	Kotabaru	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan lapangan untuk olahraga bagi warga yang berlokasi di RT 01/RW 01 selatan romomangun dengan luas 63m ² dan biaya sebesar 25.000.000
		Pengadaan/penyempurnaan sarana dan prasarana RTHP	Pengadaan fasilitas bangunan terbuka untuk balai RW untuk menciptakan kenyamanan ketika bersosialisasi dengan warga. Titik lokasi di RT 01/RW 01 dengan luas 16m ² dan anggaran pembiayaan 15.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Arah dan kebijakan makro tahun 2025 adalah:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan tugas dan fungsi membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2025, yaitu Fokus diarahkan pada

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2025 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,91 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,90 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,22 - 5,96%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,07 - 6,60%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	71%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,47 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	76,74 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	520 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.175 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	91,31 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,89 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan

dan sasaran pada Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2025, yaitu:

- a) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- b) Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan
- c) Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran DLH Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan, dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup”, dengan indikator sasaran “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Presentase Pengelolaan Persampahan, dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	54,66	55,19	55,47	55,87
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur	Capaian Pengelolaan Persampahan	%	99,60	99,60	99,70	99,70

	an Infrastrukturu Persampahan							
3.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	point	75,94	75,95	75,96	75,97

Table 1.2 Target, Sasaran, dan Indikator Kinerja DLH Tahun 2024 sesuai Renstra 2023 – 2026

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal RKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DLH Kota Yogyakarta pada tahun 2025 terdiri 7 (tujuh) rumusan program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 90.517.219.159 (*sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*). Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta.

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 23.377.948.135,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekertariat dan UPT. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perbengkelan, terdiri dari 5 kegiatan dan 25 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 47.095.800,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 7,335,300.00
- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2,819,000.00
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 36,941,500.00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 20.748.801.150,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 20,742,411,150.00
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 395,000.00
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 990,000.00
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 960,000.00
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 1,680,000.00
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 1,300,000.00
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 670,000.00
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran, dengan anggaran Rp 395,000.00

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 605.778.145,00

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 20,335,200.00

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 340,357,195.00
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 16,295,500.00
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 1,800,000.00
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 148,350,000.00
 - 6) Penyediaan Bahan/Material, dengan anggaran Rp 76,704,250
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 1,936,000
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.799.167.140,00
 Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 3,000,000.00
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 189,000,000.00
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 1,369,423,140.00
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 237,744,000
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.177.105.900,00
 Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :
- 1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 115,052,000.00
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 200,000,000.00
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 3,862,053,900

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 281.100.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 193.140.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 193,140,000.00

- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp Rp 87,960,000.00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pemantauan dan Evaluasi KLHS, dengan anggaran Rp 87,960,000.00

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.952.552.240,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH), Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan UPT. Laboratorium Lingkungan terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 808.076.340,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan anggaran Rp 241,073,800.00

- 2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 567,002,540

b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.144.445.900,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 1,917,562,000.00
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 226,883,900.00

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 12.800.093.089,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp Rp 12.800.093.089,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan anggaran Rp 4,749,548,405.00
- 2) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya, dengan anggaran Rp 8,050,544,684.00

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 641.669.300,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 641.669.300,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, dengan anggaran Rp 582,810,300.00

2) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 58,859,000.00

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2,364,859,900

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2,364,859,900

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat, dengan anggaran Rp 2,364,859,900.00

7. Program Pengelolaan Persampahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 40.576.064.935,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Persampahan (PP), terdiri dari 1 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Sampah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 40.576.064.935,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran Rp 1,071,859,000.00

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran Rp 19,347,405,100.00
- 3) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota, dengan anggaran 21,780,000.00
- 4) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota, dengan anggaran 79,451,500.00
- 5) Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah, dengan anggaran Rp 3,059,004,025.00
- 6) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, dengan anggaran Rp 4,928,887,360.00
- 7) Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah, dengan anggaran 22,070,750.00
- 8) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional, dengan anggaran Rp 12,045,607,200.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan, dan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup”, dan sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan, dan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup”, dengan indikator sasaran “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Presentase Pengelolaan Persampahan, dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki 7 (tujuh) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 90.517.219.159 (*sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 26.760.604.835,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekertariat dan UPT. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perbengkelan, terdiri dari 5 kegiatan dan 25 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 57.295.800,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 17,535,300.00
- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2,819,000.00
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 36,941,500.00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 22.169.209.100,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 22,162,819,100.00
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 395,000.00

- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 990,000.00
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 960,000.00
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 1,680,000.00
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 1,300,000.00
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 670,000.00
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran, dengan anggaran Rp 395,000.00

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini pada Sekretariat adalah sebesar Rp 534.410.395,00 sedangkan pada UPT Bengkel adalah Rp 70.743.250,00.

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 20,335,200.00
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 346,102,695.00
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 17,825,500.00
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 1,800,000.00
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 148,350,000.00 pada Sekretariat dan Rp 1.936.000,00 pada UPT Bengkel.
- 6) Penyediaan Bahan/Material (UPT Bengkel), dengan anggaran Rp 76,704,250

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.502,067,140.00

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 3,000,000.00

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 189,000,000.00
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Sekretariat, dengan anggaran Rp 1,310,067,140.00 sedangkan pada UPT Bengkel dengan anggaran Rp 237,744,000.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 315,424,000.00

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 115,424,000.00
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 200,000,000.00
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT Bengkel), dengan anggaran Rp 3.294.119.100,00.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 241.100.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 153.140.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 153,140,000.00

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp Rp 87,960,000.00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pemantauan dan Evaluasi KLHS, dengan anggaran Rp 87,960,000.00
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.482.119.700,00 dan pada UPT Laboratorium sebanyak Rp 992.804.540,00.
Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH), Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan UPT. Laboratorium Lingkungan terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 808.076.340,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan anggaran Rp 237,673,800.00
 - 2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 992.804.540,00.
 - b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.244.445.900,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 1,917,596,500.00
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 326,849,900.00
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 19.098.895.889,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp Rp 19.098.895.889,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan anggaran Rp 8,069,260,955.00

2) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya, dengan anggaran Rp 11,029,634,934.00

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 636.829.300,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 636.829.300,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, dengan anggaran Rp 582,810,300.00

2) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 54,019,000.00

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2,364,859,900

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2,364,859,900

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat, dengan anggaran Rp 2,364,859,900.00

7. Program Pengelolaan Persampahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 36.519.597.045,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Persampahan (PP), terdiri dari 1 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Sampah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 36.519.597.045,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran Rp 1,071,859,000.00
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran Rp 18.654.827.220,00
- 3) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota, dengan anggaran 21.780.000,00
- 4) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota, dengan anggaran 79.451.500,00
- 5) Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah, dengan anggaran Rp 2.988.714.925,00

- 6) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, dengan anggaran Rp 1.638.476.450,00
- 7) Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah, dengan anggaran 18.880.750,00
- 8) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional, dengan anggaran Rp 12,045,607,200.00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Dinas Lingkungan Hidup					90.517.219.159,00								90.483.154.002,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					90.517.219.159,00								90.483.154.002,00		
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					90.517.219.159,00								90.483.154.002,00		
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	A Nilai			A Nilai	23.157.998.485,00							A Nilai	25.528.916.434,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	28dokumen			28 dokumen	57.295.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup	28dokumen	61.271.850,00		
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	17.535.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		17.535.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

	2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	960.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		1.056.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	1.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		1.848.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				5 Dokumen	1.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		1.430.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	670.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		726.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	395.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		434.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	5laporan			5 laporan	534.410.395,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Administrasi Perkantoran dan Karyawan Dinas Lingkungan Hidup	5laporan	579.851.665,00	

	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		3.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	189.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		207.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	1.310.067.140,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		1.506.365.454,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai	150unit			2 laporan	315.424.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup	150unit	346.557.200,00	
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					99 Unit	115.424.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		126.557.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100.00% 100%		100 % 75 %	241.100.000,00							100.00% 100%	309.210.000,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1dokumen		1 dokumen	153.140.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta	1dokumen	212.454.000,00		
	2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota														
							Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan			1 Dokumen	153.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta		212.454.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-		-	87.960.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	96.756.000,00		
	2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS														

						Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi			3 Dokumen	87.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta		96.756.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	73,10% 100%		60.53 % 76.67 %	2.482.119.700,00						73,10% 100%	2.624.071.670,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5dokumen 3dokumen		3 dokumen	237.673.800,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	5dokumen 3dokumen	265.181.180,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			3 Dokumen	237.673.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		265.181.180,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4dokumen			4 dokumen	2.244.445.900,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta; Sungai di Kota Yogyakarta	4dokumen	2.358.890.490,00			
	2	11	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																
						luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota					320400 M2	1.917.596.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta; Sungai di Kota Yogyakarta		2.109.318.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																
						jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota					5 Kegiatan	326.849.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta; Sungai di Kota Yogyakarta		249.572.290,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian Pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan	61.6661 %			61.6661 %	19.098.895.889,00								61.6661 %	14.080.102.398,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola	3.06Ha 76.7Ha			2.96 Ha 76.7 Ha	19.098.895.889,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan Taman Kota	3.06Ha 76.7Ha	14.080.102.398,00			

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				12 Dokumen	18.654.827.220,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		21.282.145.561,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	21.780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		23.958.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
							Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				1 Dokumen	79.451.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		87.396.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah														

						Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				94 Unit	2.988.714.925,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		3.364.904.428,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				34430 Ton	1.638.476.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		5.421.776.096,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah													
						Jumlah sampah yang terdaur ulang				15000 Ton	18.880.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		24.277.825,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional													

							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			21900 Ton	12.045.607.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		13.250.167.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							UPT Laboratorium Lingkungan				992.804.540,00								623.702.794,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				992.804.540,00								623.702.794,00	
	2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				992.804.540,00								623.702.794,00	
8	2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	73,10% 100%		60.53 % 76.67 %	992.804.540,00						73,10% 100%	623.702.794,00	
	2	11	03	2.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel air dan udara yang dapat terlayani meningkat	5dokumen 3dokumen		100 %	992.804.540,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	4 Sungai di kota Yk, 10 IPAL domestik, Sumur 45 kelurahan	5dokumen 3dokumen	623.702.794,00	
	2	11	03	2.01	0015		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			2 Dokumen	992.804.540,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	4 Sungai di kota Yk, 10 IPAL domestik, Sumur 45 kelurahan		623.702.794,00	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	
							UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan				3.602.606.350,00								4.572.507.565,00	

	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												4.572.507.565,00			
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													4.572.507.565,00		
9	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	A Nilai			A Nilai	3.602.606.350,00						A Nilai	4.572.507.565,00		
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	5laporan			5 laporan	70.743.250,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	UPT PSPP DLH	5laporan	86.504.275,00	
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material															
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	68.807.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	UPT PSPP DLH		84.374.675,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN	
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	1.936.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	UPT PSPP DLH		2.129.600,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN	
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai	3laporan			2 laporan	237.744.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan UPT PSPP DLH	3laporan	237.744.000,00		
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	237.744.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan UPT PSPP DLH		237.744.000,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN	

	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan Selesai	150unit			150 Unit	3.294.119.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas DLH	150unit	4.248.259.290,00		
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				182 Unit	3.294.119.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas DLH		4.248.259.290,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN	
	J U M L A H											90.517.219.159,00								95.679.364.361,00	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan

6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, Juli 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta

Drs. Sugeng Darmanto

NIP. 1965012219920310005